

MITIGASI BENCANA SOSIAL POLITIK SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS DEMOKRASI PANCASILA

Oleh : **Alexius Sunaryo**
Email: sectiot@gmail.com

Abstract

Mitigation of Social and Political Disasters as a Pancasila Democracy-Based Public Policy as an idea, because experience and knowledge show that the political process has an increasingly negative impact on the existence of the Republic of Indonesia. First, every political process that initially runs safely and peacefully, but more and more years of simple election political processes such as the Kades, Kada, President and Legislative elections, always arises which initially does not affect social relations in society, but the upheaval increases in quality and the quantity. Second, the quality and quantity of noise as a result of the political process, especially in this 2019 political year which increasingly tends to threaten the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. Third, this tendency is caused mainly by a number of narrow-minded political elites, utilizing SARA factors, especially religion as a political tool. Fourth, SARA which was originally a potential development development towards the welfare of the people, turned into a problem that tends to threaten the existence of the Indonesian state, like "fire in the husk". This is therefore to return the function of SARA as a potential for national development, towards a just and prosperous society, carried out through Social and Political Mitigation as proposed.

Keywords: Disaster Mitigation, Pancasila Democracy, SARA.

A. Latar Belakang

Pertama, beberapa kekecewaan masyarakat yang semakin diperkuat dengan beberapa peristiwa perjuangan masyarakat, yang berakhir pada penderitaan dan atau minimal penumpukan kekecewaan dan kemudian menjadi kristalisasi rasa kecewa, karena tindakan pemerintah dan terutama pada DPR yang akhir-akhir ini memanfaatkan “*injury time*” yang merupakan buah pikir “*positive thinking*” bagi kalangan DPR, tetapi bagi masyarakat cerdas melihat gelagat DPR yang menunjukkan kecenderungan berbuat ketidakadilan, terwakili pendapat dan gambaran umum seperti :

- *POLITISASI HOAKS*. Politisasi hoaks dan ujaran kebencian kurang efektif menarik perhatian pemilih bimbang kecuali menyentuh isu primordial agama, etnis, dan ras. Psikoanalisis Sigmund Freud menyatakan, “manusia tak dikendalikan oleh rasio, tetapi instansi ketidaksadaran: ego, subyektivitas, insting, emosi. Inilah yang mesti diantisipasi. Celaknya, beberapa pihak secara sengaja memanfaatkan hal ini untuk tujuan politik sesaat tanpa memikirkan dampaknya untuk bangsa yang sedemikian majemuk dan mengandung potensi konflik horisontal. (Kompas, 24 Nopember 2018: 7, kolom 4-7.).
- *HUTAN ADAT* Otsus Papua Belum Beri Manfaat. Status otonomi khusus bagi Papua belum memberikan manfaat bagi masyarakat adatnya untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara legal. Mereka tak bisa memanfaatkan hutan, terutama kayu, karena terganjal dualisme perundangan (Kompas, 21 Desember 2018: 13, kolom 1-3.)
- *TAJUK RENCANA*. Pilihan Aman DPR. Komisi III DPR mengambil jalan aman dengan memilih kembali dua hakim konstitusi Aswanto dan Wahiduddin Adam pada Selasa, 12 Maret 2019. “Daripada memilih coba-coba dengan tantangan pemilu, kami pilih yang sudah pengalaman saja”, kata ketua komisi III DPR Kahar Muzakir & wakil komisi III DPR Trimedy Panjaitan. Kritik publik bahwa DPR hanya mau main aman juga harus diterima. Hakim konstitusi pilihan DPR dinilai kurang berpihak pada perlindungan Hak Azasi Manusia, Kebebasan berekspresi dan perlindungan kelompok minoritas serta kurang responsif dalam menghadapi dinamika sosial kemasyarakatan (Kompas, 14 Maret 2019:6, kolom 1).
- *OPINI*. Bangsa Dilamun Lupa. Akhir Nopember 2018. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh melaksanakan kegiatan Dengar Suara Mereka : Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu Aceh. Namun, protokoler kesaksian itu sedemikian pelik. Para korban tak boleh menyebut nama atau institusi pelaku kejahatan. Tidak ada nama, tanggal, waktu dan tempat yang boleh disebutkan. Wartawan juga tidak dibolehkan memberitakan situasi

testimonial kecuali yang telah dirilis oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. (Kompas, 14 Maret 2019:7, kolm 1-4.)

- Lingkungan Rusak, Manusia Terancam. Degradasi lingkungan telah memicu kematian dini jutaan orang. Kegagalan mengatasi laju kerusakan lingkungan ini akan mengancam keberlangsungan hidup manusia di Bumi (Kompas, 28 Maret 2019 : 10, kolm 1-7.)
- Kasus Munir, Ujian yang Belum Selesai, Ujian sejarah bagi kita. Itulah yang pernah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono terkait kasus pembunuhan terhadap Munir Said Thalip. Setelah 15 tahun berlalu, ujian itu ternyata belum juga tuntas dikerjakan. (Kompas, 7 September 2019:3, kolom 1-3).
- Revisi UU KPK. Baleg DPR: Nasukan Publik Tak Lagi Diperlukan. Badan Legislasi DPR juga menegaskan tak lagi membutuhkan masukan dari masyarakat maupun dari ataupun dari KPK dalam pembahasan revisi UU KPK. (Kompas, 13 September 2019:3, kolm 3-7).
- RKUHP Ancam Kelompok Rentan. Desakan agar RKUHAP ditunda untuk disetujui menjadi UU di Rapat Paripurna DPR terus muncul. Sejumlah ketentuan kontroversial masih ada dalam RKUHAP. (Kompas, 20 September 2019 : 3, kolm 6-7.)

Kedua, Kebijakan pemerintah yang sangat longgar dan ideal baiknya dan akhirnya bila terjadi penyimpangan terkesan sengaja dibiarkan, ternyata dimaksimalkan pemanfaatannya oleh kelompok berpemahaman sempit untuk tergambar dalam lunaknya, sikap pemerintah terhadap berbagai hal peristiwa kegiatan yang semakin merongrong sendi-sendi utama prinsip dan azas perikehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjunjung tinggi dan mendasarkan kepada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain yang menonjol, adalah :

- *POLITIK & HUKUM*. Kohesi Sosial Terdampak. Penggunaan isu agama untuk kepentingan politik dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat utama penyebarab membuat sikap saling percaya dalam masyarakat hilang.

Menguatnya sentimen agama di kehidupan sosial masyarakat buka merupakan ekspresi kultural masyarakat, melainkan hasil dari eksploitasi isu agama oleh elite politik dalam setiap kontestasi politik, kata Septi Satriani, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. (Kompas, 24 Nopember 2018: 5, kolm 3-7.)

- *DEMOKRATISASI*. Pemilu Makin mahal dan Gaduh. Pemilu 2019 dirasa semakin mahal dan gaduh dibandingkan pemilu sebelumnya. Polarisasi yang terjadi di masyarakat saat Pemilu lalu juga masih bisa berdampak hingga pemilu 2024. Saat ini, banyak kandidat yang berkualitas yang kalah di pemilu karena masalah logistik. ... kini dibutuhkan biaya Rp. 5 milyar-Rp. 500 milyar untuk menjadi anggota DPR. Sementara untuk mengikuti pemilihan bupati/wali kota, dibutuhkan biaya Rp. 50 milyar-Rp. 100 milyar. Uang itu biasanya berasal dari pengusaha di daerah. kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubro. (Kompas, 1 Agustus 2019 : 2, kolm 5-7.)
- *UNJUK RASA*. Presiden : Menyampaikan Pendapat Hak Konstitusional. Jangan rusuh, jangan anarkistis, jangan sampai merusak fasilitas-fasilitas umum sehingga menimbulkan kerugian. Yang paling penting itu, Kata Presiden. Usut Tuntas ... Selain tuntutan terkait dengan legislasi di DPR, di beberapa daerah juga muncul desakan agar pemerintah mengusut tuntas tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari dalam unjuk rasa pekan lalu, yakni Rnadi(20) dan Yusuf (19). Randi meninggal setelah terkena tembakan, sedang Yusuf meninggal akibat terluka parah di bagian kepala. (Kompas, 1 Oktober 2019 : 1, kolm 3-7).

Sebagai salah satu bukti, adalah pendapat para tokoh bangsa kita yang dengan nada sopansantun yang sangat tinggi, menampar kata hati para wakil rakyat yang sudah akan habis masa kerjanya, tetapi berusaha untuk mengesahkan beberapa RUU dan kebijakan publik lainnya. Yang jelas-jelas merugikan rakyat, tetapi tetap ngotot bertahan dan bahkan sudah ada yang diputuskan sebagai UU, sehingga sebagian tokoh bangsa itu menyampaikan

pandangannya yang sangat cemerlang untuk berusaha melindungi kepentingan warga bangsa, dengan menyampaikan pernyataan dukungan dan arahan, bahwa:

Suara-suara sebagian kalangan yang keberatan terhadap proses seleksi dan revisipun disampaikan. Bukan hanya masyarakat sipil, berbagai tokoh besar, seperti Buya Syafii Maarif, Sinta Nuriyah Wahid, Salahuddin Waagnis-Suseno, berulang menyampaikan pesan. “Dengarkan masukan yang jernih , karena tidak semua yang di kelilingnya (Presiden) itu Baik”. Ujar Syafii. (Kompas, Minggu, 15 September 2019, hal. 2 : kolom 2)

Ketiga, justru karena pergeseran paradigma logika kerja, dari yang semula Pancasila sebagai Dasar Negara, dan sekarang Pancasila menjadi turun derajat dan fungsinya menjadi, Pancasila hanya sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan justru fungsi dasar negaranya menjadi hilang, maka negara Indonesia kita, semakin tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk berpijaknya semua hasil hukum dalam mempertahankan eksistensi kekokohan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu sinyalemennya adalah :

Pendapat Majend. Pur. Saurip Kadi : Rekonsiliasi dan Amandemen UUD. Fakta membuktikan bahwa tak sedikit negara yang majemuk justru berhasil mermbangun peradaban bangsanya dengan gemilang. Sebaliknya banyak negara homogen malah terus dilanda konflik internal berkepanjangan dan sudah barang tentu dengan biaya politik sangat besar, termasuk jatuhnya korban diantara anak bangsa sendiri. (Kompas, Senin, 16 September 2019, hal 6 : kolom 2)

Tanpa ada dasar yang kokoh, pilar berpijak pada apa ? sangatlah ironis karena semakin berkualitas kekuatan ke empat-empatnya pilar yang dibangun, justru akan semakin mempercepat untuk tenggelam dan lenyaplah pilar-pilar itu, oleh karena tidak adanya pijakan landasan dasar, dan ibaratnya pilar-pilar itu hanya bersandar pada tanah yang subur loh jinawi, tetapi tidak kuat

menahan pilar. Hal ini pernah dikritik sangat tajam oleh mantan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) rezim Orde Baru, dengan makalah yang intinya SESAT PIKIR, bila menghilangkan fungsi falsafah Pancasila sebagai dasar negara, dan hanya berfungsi sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harian Kompas, 21 Desember 2018 lalu, dalam dalam kolom Pendidikan & Kebudayaan, memuat artikel berjudul Hantu Kebenaran Era Post-truth.

... Post-truth (pasca-kebenaran) adalah iklim sosial politik, dimana obyektifitas dan rasionalitas membiarkan emosi atau hasrat memihak keyakinan meski fakta memperlihatkan hal yang berbeda. Berkembang jurnalisme yang membakar nafsu dan keyakinan, radikalisme, prasangka negatif, serta politik ekstrem lewat media sosial, seperti blog, portal palsu, dan media sosial yang anonim, kata pengajar Filsafat Etika dan Politik Universitas Sanata Dharma dan Universitas Indonesia, J Haryatmoko SJ., mengutip pernyataan JA Llorente. (Kompas, 21 Desember 2018 : hal.12 : 1).

Walau demikian, kebijakan penetapan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimaksud, dan memuat pilar-pilar itu adalah PBNU, yaitu :

- Pilar pertama, adalah Pancasila, Persatuan Kesatuan Warga Bangsa Indonesia, dalam kehidupan harus aktif di masyarakat lokal, nasional maupun internasional; Negara selalu mengimplementasikan hasil dari persatuan Indonesia yang dinyatakan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam perwusyawaratan perwakilan, ke arah perwujudan kemanusiaan yang adil dan beraadab, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Pilar kedua, adalah Bhineka Tunggal Ika, digunakan dasar untuk pengembangan diri pribadi yang semakin bermanfaat bagi semakin banyak orang, hidup berdampingan saling mendukung bukan saling mematikan, sehingga menghasilkan banyak karya yang berbeda tetapi saling menguatkan dan melengkapi;

- Pilar ketiga, adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesanti NKRI harga mati, merupakan tekad membaja segenap / seluruh warga bangsa untuk semakin menguatkan bahwa hikmah kemerdekaan untuk selalu berupaya mengedepankan persatuan dengan tidak saling mematikan identitas : Suku, Agama, Ras/perbedaan warna kulit serta antar golongan, masing-masing tetap menuju dan menjadi suatu ikatan dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; dan
- Pilar keempat, adalah dalam memperjuangkan kehidupan bersama secara pribadi dan atau sosial, selalu menerapkan aturan dasar UUD 1945. Sebagai pedoman umum berkehidupan dalam kebersamaan sebagai sebuah negara bangsa, yang semakin berhasil mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Realitas dalam kehidupan bersama yang sudah jelas ada dasarnya itu saja, masih ada sebagian kecil warga, bahkan sebagian pemimpinnya, masih mencari celah di dalam kebijakan ideal pemerintah itu, untuk kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang lebih mengutamakan “berfikir sempit” yang menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, dengan semakin memaksimalkan upaya mendiskreditkan kerja pemerintah dengan menerapkan dan bersandar pada pola *negatif thinking*.

Pola kerja dengan berfikir negatif itu tentu semakin mendapat angin segar, sehingga melihat keberhasilan pemerintahan yang semakin terukur jelas keberhasilannya, tetap dipandang kurang/tidak berhasil, karena melihatnya dari sisi yang negatifnya saja, bahkan menjurus ke pemberitaan yang cenderung palsu dan atau fitnah; Sayangnya, pihak pemerintah memang terkesan tidak tegas dan seakan-akan terjadi pembiaran oleh pemerintah. Bukti riil menunjukkan bahwa :

Hasil jajak pendapat litbang KOMPAS dengan 512 responden di 14 kota besar di Indonesia pada 17-19 Mei (2017) lalu mengindikasikan kohesi social yang menjadi pengikat keberagaman bangsa Indonesia tengah bermasalah. Jawaban

semakin lemah mendapat proporsi paling besar saat ditanya soal indicator kohesi social, seperti solidaritas social, toleransi antar umat beragama, toleransi antar suku/etnis, serta toleransi antar golongan.” (Saatnya Menjawab Tantangan. Keadilan Dan Persatuan Menjadi Tantangan”, dalam Kompas, 22 Mei 2017, hal.1 kolom 2.)

Kondisi demikian, semakin lama pasti akan semakin memunculkan suatu kondisi yang dapat mendorong timbulnya rasa takut akan lahirnya peristiwa-peristiwa menyedihkan yang semakin lama akan semakin banyak kesedihan itu, sehingga pada saatnya bila tidak terbendung (karena fungsi Pancasila tidak lagi kokoh sebagai Dasar Negara), akan dapat menimbulkan bencana sosial, sebagai akibat dari praktek demokrasi yang semakin menyimpang pelaksanaan dari Demokrasi Pancasila. Dengan demikian maka konsep Mitigasi Bencana “Sosial Politik” sebagai Kebijakan Publik Berbasis Demokrasi Pancasila, diperlukan, setidaknya disiapkan sebagai upaya antisipasi yang bersifat preventif.

Mitigasi bencana adalah “serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).” (https://id.wikipedia.org/wiki/Persiapan_bencana, diakses senin, 25/03/2019 jam 13.09).

Sedangkan yang dimaksud bencana itu sendiri, adalah “sebuah peristiwa (rangkaiannya peristiwa) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat. Bencana dapat mengakibatkan kematian, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.” (Yayasan IDEP., Panduan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Yayasan IDEP., Bali, 2010 : xi)

Segala bentuk dan jenis bencana, dapat mengakibatkan terancam dan terganggunya kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat, baik bencana :

- 1) Alam, bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa, seperti : gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, gunung meletus, kekeringan, angin topan, atau wabah penyakit yang disebabkan oleh alam;
- 2) Non Alam, bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa, non alam, seperti : bencana industri, kegagalan rekayasa katastropik (bangunan runtuh, kegagalan dan efek negatif penerapan tehnologi, dll);
- 3) Sosial, bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa, tindakan manusia, seperti : konflik sosial, terorisme, dll.

Akhirnya dapat terlihat jelas, gambaran tentang apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana sosial, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa, tindakan manusia, seperti : konflik sosial, terorisme, radikalisme dll.

Dengan demikian semakin jelas, dan menjadi ciri utama mitigasi bencana sosial, adalah tindakan manusia yang menjadi penyebab utama kebencanaan atau peristiwa kebencanaan itu terjadi.

Kemungkinan timbulnya bencana sosial yang diakibatkan oleh dan atau adanya praktek-praktek penyelewengan terselubung penggunaan “kewenangan/ kekuasaan/ kekuatan” dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau bahkan pemerintahan, antara lain karena beberapa alasan utama, yaitu :

Mencegah Pembusukan Demokrasi. Pemilihan langsung yang digelar sejak 2005, kini berada pada titik kelemahan luar biasa. Banyak cerita kepala daerah, berakhir tidak bahagia. Hampir hampir publik imun menyaksikan berkali-kali kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, karena kasus korupsi. ... sepanjang 2018, telah 27 kepala daerah diproses hukum KPK. Jika dihitung dari tahun 2004-2017, data Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menyebutkan ada 392 kepala daerah terjerat hukum dengan 313 diantaranya kasus korupsi.

Lagi pula masalah korupsi bukanlah menyangkut angka-angka numerik, tetapi soal substantif, menyangkut mental dan karakter kepemimpinan. Sesuai amanat revormasi, seharusnya zero tolerance terhadap korupsi, karena korupsi merusak sendi-sendi dasar bangsa.

Kasus korupsi kepala daerah adalah sisi gelap demokrasi. Demokrasi langsung menuntut perolehan suara terbanyak. Dalam kontestasi politik yang lebih mempertontonkan rebutan kekuasaan, segala cara difokuskan guna merebut kekuasaan itu. Tak heran, politik uang jadi jalan pintas. Padahal, sebetulnya tidak compatible dengan sistem pemilihan langsung. Demokrasi langsung ditentukan oleh figur seseorang.

Sepanjang era demokrasi langsung, best practices itu sudah kita miliki. Ada beberapa contoh. Kisah-kisah kesuksesan kepala daerah menjadi bukti sisi positif demokrasi langsung. Memang, kita tidak menafikan ada banyak kisah gelap. Selain praktek korupsi, juga suburnya praktek dinasti politik. Jabatan publik didistribusikan di antara keluarga dan kerabat. Ini terjadi karena modal politik dan jaringan keluarga sangat kuat dan potensinya begitu besar terhadap tingkat elektabilitas sehingga jabatan publik berputar-putar di pusara keluarga patron. Parahnya lagi, terjadi juga perselingkuhan antara praktik dinasti politik dan korupsi. (Mencegah Pembusukan Demokrasi, dalam Kompas, Jumat, 14 Desember 2018, hal.2 Kolom 2-5).

Bahwa semakin disadari keberhasilan pendidikan politik bangsa Indonesia, mengantarkan kesadaran pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dalam rangka memilih pemimpin bangsa dan negara, semakin baik pelaksanaan dan hasilnya. Budiman Tanuredjo, warawan senior Kompas, menyatakan bahwa :

Hari Minggu, 20 Oktober 2019, penting bagi kalender konstitusional bangsa Indonesia. Pada hari itu mandat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla berakhir. Pemerintahan tak boleh kosong karena itulah regularitas

demokrasi harus dijaga. Sirkulasi elit hanya melalui pemilihan umum, tidak ada jalan lain.

Jika semua berjalan dengan baik (dan diyakini akan baik berdasarkan catatan sejarah), Indonesia bisa mengukuhkan diri sebagai negara dengan demokrasi yang kian matang (mature democracy).

Salah satu hal yang harus menjadi perhatian adalah ancaman tren penurunan tingkat partisipasi politik dari pemilu ke pemilu. Kelelahan politik tampaknya menjadi isu yang harus kembali dialami. Di sejumlah kota, termasuk kota Medan, tingkat golput dalam pilkada besar, pernah mencapai 74 persen. (8) Politik Viral menuju 20 Oktober 2019 dalam Kompas, Jumat, 14 Desember 2018, hal.2 Kolom 2.

Mencegah pembusukan demokrasi dan juga Politik Viral menuju 20 Oktober 2019, menjadi pertimbangan sangat urgen, karena demokrasi menjadi type ideal dalam banyak negara.

Keidealannya demokrasi, terletak pada: secara simpel teoritis sangatlah ideal, karena seharusnya bidang perencanaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat, dimana dan karena para pemimpin dan pengelola negara, di bidang legislatif /perencanaan, bidang eksekutif/ implementasi, dan bidang yudicatif/ pengawasan dibentuk, ditentukan dan mandiri.

Dengan demokrasi Indonesia kini mencapai posisi ekonomi yang jauh lebih baik, ketimbang saat krisis 1997/1998. Dengan fondasi ekonomi ini, Indonesia diprediksikan akan memainkan peran lebih penting dalam perekonomian global. Pemajuan demokrasi dan hak asasi di satu bangsa pada hakekatnya lebih banyak ditentukan oleh kemauan dan dialektika dalam bangsa itu sendiri. Ia selalu merupakan buah dari inisiatif dan pertumbuhan dari dalam. Konsolidasi demokrasi pada akhirnya berfungsi untuk memastikan agar sirkulasi elite berjalan secara demokratis dan menghasilkan rezim politik baru yang juga demokratis.

Yang lebih bahaya : dalam konteks dimana media terfragnetasi dalam berbagai kubu kepentingan, maka kebenaran dalam arti yang substansial, historis dan faktual bisa benar-benar lelap. (Djoko Suyanto, Demokrasi Kita, 8 Pemikiran Politik, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014 : 5,16,21,54.)

Dalam bidang Legislatif para wakil yang dipilih : dari, oleh dan untuk rakyatnya sendiri; sehingga dalam pengelolaan aspirasi, yang kemudian menjadi rencana aksi oleh bidang yang sudah berkompetensi tinggi, dan kemudian rencana aksi menjadi dasar paling ideal, mudah, murah dan seharusnya semakin lancar dalam pelaksanaan rencana aksi dalam kancah kehidupan masyarakat menjadi aksi nyata, yang dilakukan oleh yang berwenang di bidang Eksekutif dan di control atau diawasi oleh bidang Yudikatif, secara teoritis tidak ada peluang yang dapat digunakan untuk menyalahi aturan yang dikenal dengan sebutan KKN (atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Hanya saja sebegitu apapun upaya ke arah pengelolaan yang ideal, tetapi realitasnya ternyata, hampir-hampir publik dibuat imun menyaksikan berkali-kali kepala / pemimpin daerah ditangkap KPK.

Dari sudut pandangan sosial yang lain, Dr.J.Kristiadi, peneliti senior CSIS, mengemukakan bahwa materi debat ke empat 30 Maret 2019 untuk kandidat presiden dan wakil presiden, mengambil tema cukup berat, ideologi, pemerintahan, keamanan dan hubungan internasional, terdapat hal mendasar antara lain, terutama dalam bidang politik, yaitu : “Isu ideologi sangat eksistensial karena besar pengaruhnya terhadap tatanan kekuasaan negara yang beradab dan bermartabat, pemerintahan efektif, serta memberdayakan masyarakat sehingga mampu mewujudkan checks and balances dalam pergolakan politik yang demokratis” (9) Dr.J.Kristiadi, Perkakas Politik, dalam Kompas, Kamis 28 Maret 2019, hal.1 kolom 3 . Demikian juga dalam hal ideal yang kita inginkan dalam kebersamaan suatu bangsa, teristimewa bangsa Indonesia, bila selalu menerapkan aturan hidup bernegara secara legowo,

ditinjau dari sudut SUKU, ajaran AGAMA, perbedaan warna kulit atau RAS, dan hidup dalam kebersamaan ANTAR GOLONGAN dalam hidup bermasyarakat, dan disiplin / mematuhi aturan yang sederhana saja, kita bangsa Indonesia sudah dalam posisi yang Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Karena “situasi harmonis dan perdamaian antar bangsa, sangat tergantung pada ada atau tidaknya sikap toleransi. Sikap toleransi dan penerimaan akan pihak lain, sungguh sangat tergantung pada apa dan bagaimana informasi yang kita dapatkan mengenai pihak lain itu.” (Djoko Suyanto, opcit., 60)

Bila kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kecenderungan nuansa demokrasi yang terlalu bebas, menghasilkan berbagai berita hoaks, yang substansi hoaksnya semakin berani menukik dan mencampur-adukkan persoalan pribadi dengan kebangsaan yang mengarah kepada perpecahan negara bangsa. Bila kondisi seperti di atas dibiarkan, maka kecenderungan semakin marak berita hoaks yang semakin tak terkontrol, akan tercipta suasana yang mudah menumbuh-kembangkan, timbul dan berkembangnya peristiwa negatif yaitu bencana sosial dalam praktek penerapan demokrasi yang beruntun yang semakin merugikan kehidupan masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, sekali lagi sangat diperlukan pemikiran preventif dengan Mitigasi Bencana “Sosial Politik” sebagai Kebijakan Publik Berbasis Demokrasi Pancasila.

B. Potensi Mitigasi Sosial Politik di Alam Demokrasi

Kesadaran penuh pemerintah melalui kebijakan yang fleksibel dan umumnya penuh permakluman dalam banyak hal, memberi wacana tumbuh dan berkembangnya kondisi yang selain negatif juga sekaligus positifnya. Tumbuh dan berkembangnya kondisi yang positif, dapat dilihat dari makin banyaknya anggota masyarakat yang merasa semakin tumbuh dan berkembangnya kebebasan berpendapat yang tetap dalam bingkai bebas yang bertanggungjawab, sehingga mendukung ketentraman masyarakat.

Masyarakat Indonesia sudah jauh “mengadopsi” berbagai nilai dan ajaran agama sebagai jati diri dalam kehidupan sehari-hari yang beraneka

ragam budaya, ras, agama, yang menghantar kepada pemahaman spiritualitas agamanya sendiri-sendiri, sehingga bentuk dan perilaku kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, nyaris identik dengan struktur masyarakat yang dikehendaki agama, bukan dalam arti tekstual semata, tetapi begitu lebih mendalam dan lebih mengedepankan fungsional inti ajaran agama dan kepercayaannya, yaitu : bahwa ternyata semua pedoman dan arah agama dan kepercayaan, yang benar mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan, syukur bisa berlomba berbuat kebaikan (berfastabigqulqiroth).

Hal itulah yang menjadi dasar spiritualitas yang kita percayai, kita hayati, sekaligus kita amalkan dalam fungsi kebersamaan, yaitu : amal kasih (amal solleh nahimunkar), sebagai pedoman ibadah dan sekaligus pengamalan iman yang memasyarakat. Jadi eksistensi fungsi agama lebih “didayagunakan” untuk bersifat sadar mengorbankan sentimen politik massa.

Dalam kondisi yang harmonis itu, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang karena keyakinan kuasa baikNYA itu, kita pahami, kita hayati dan kemudian kita amalkan, sehingga diakui dan atau tidak diakui, telah membawa kita pengaruh yang sangat dominan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Tetapi, tumbuh dan berkembangnya kondisi yang negatif “Tidak dapat disangkal lagi, bahwa berbagai penyakit birokrasi yang selama ini berkembang telah membuat birokrasi publik di Indonesia menjadi disfungsional dalam menjalankan misinya baik sebagai agen pelayanan, maupun sebagai agen perubahan (agent of development program)” (10) Agus Dwiyanto, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Gramedia Pustaka Jaya, Jakarta, 2011 : vii.

Kondisi tertib, aman dan tenteram dalam masyarakat kita, karena hidup bersama dengan penuh solidaritas/solider dan toleran, menjadikan SARA atau Suku Agama Ras dan Antar golongan, sama sekali bukan merupakan masalah; bahkan SARA di Indonesia sebagai potensi yang menjanjikan yang

mendukung eksistensi NKRI, yang terlahir dari Konsensus Nasional para Pendiri Bangsa.

Pemaksanaan kehendak sebagian kecil warga negara Indonesia yang akan memulai mengedepankan wacana mengganti Negara Indonesia yang berPBNU., dengan paham lain, akan menimbulkan dan menjadi masalah besar bagi keutuhan NKRI itu sendiri. Karena “melayani warga adalah tugas negara. Bukan hanya itu, melayani publik adalah alasan mengapa negara ada”, demikian pernyataan Marsekal(purn)Djoko Suyanto, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (2005) dan Mantan Komando Panglima TNI (2006) dalam bukunya yang berjudul “Demokrasi Kita”. Maka begitu penting eksistensi kita sebagai bangsa yang belakangan ini mulai digoyang dengan semakin tumbuh pesat dan meresahkan, dengan adanya kehendak yang ingin mengganti dasar negara yang sudah beralih fungsi sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu dengan dasar negara selain Pancasila. Kemudian pada saat yang hampir bersamaan, merespon idea penggantian itu, mulai tumbuh subur dan berkembang rasa kesekesatuan atau “esprit de courps” untuk mempertahankan NKRI sebagai NKRI harga mati, yang mulai merasa hal tersebut sebagai ancaman yang serius. Dipihak lain, tumbuh dan berkembangnya kondisi yang bersifat negatif, karena secara alami “Tidak dapat disangkal lagi, bahwa berbagai penyakit birokrasi yang selama ini berkembang, telah membuat birokrasi publik di Indonesia menjadi disfungsional dalam menjalankan misinya baik sebagai agen pelayanan, maupun sebagai agen perubahan (agent of development program)”. (Agus Dwiyanto, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Gramedia Pustaka Jaya, Jakarta, 2011 : vii)

Bila kita perhatikan dengan benar dan sungguh-sungguh, kecenderungan nuansa demokrasi yang terlalu bebas, menghasilkan berbagai berita hoaks, yang substansi hoaksnya semakin berani menukik dan mencampur-adukan persoalan pribadi dengan persoalan kebangsaan yang mengarah kepada perpecahan negara bangsa. Bila kondisi seperti itu tetap semakin dibiarkan,

maka kecenderungan semakin marak berita hoaks dan semakin tidak terkontrol, secara cepat akan tercipta suasana yang mudah menumbuhkan timbul dan berkembangnya peristiwa negatif yang sangat mengerikan, yaitu timbulnya kecelakaan nasional, berupa bencana sosial dalam praktek penerapan demokrasi yang beruntun yang “TSM” terstruktur, sistematis dan masif, yang tidak saja merugikan kehidupan bersama sebagai bangsa bangsa dan negara, sampai ke akar rumput. Oleh karena itu, sangat diperlukan usaha pencegahan dengan konsep pemikiran “Mitigasi Bencana Sosial Politik Berbasis Demokrasi Pancasila” tepat adanya.

C. Mitigasi Sosial Politik Berbasis Demokrasi Pancasila

“Hanya apabila negara mampu menjamin kesetaraan dalam kesamaan hukum bagi seluruh warga negara terlepas dari agama, ras, etnisnya, kita mampu memupus perbedaan mendasar antara Jakarta dengan kota-kota lain yang jauh”. (Djoko Suyanto, *Opcit.*, 103.) Pernyataan tersebut, untuk memberikan gambaran global tentang permasalahan dan cara mengatasi permasalahan yang terjadi atas pertimbangan kesejahteraan, baik dalam pemenuhan kebutuhan primer, secounder dan tersier dalam berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, pendidikan dan bidang sosial kehidupan lainnya, sehingga bencana sosial akan semakin dapat dieliminir, secara terencana dalam berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat. Demikian dalam konsep mitigasi sosial politik di alam demokrasi, dapat semakin disinergikan dengan dan melalui buku pedoman/panduan penanggulangan resiko bencana berbasis masyarakat.

Untuk dapat segera mempersiapkan konsep mitigasi sosial politik di alam demokrasi, terutama dalam pembuatan panduan praktis yang sangat diperlukan harus dipersiapkan dengan matang, adalah panduan praktis sebelum bencana sosial itu terjadi, dengan berbagai pertimbangan, bahwa perencanaan sebelum terjadinya bencana sosial, :

- Merupakan usaha pencegahan yang beayanya akan lebih muran/lebih efisien, daripada perencanaan dan setelah bencana terjadi;

- Akan sekaligus mengurangi ketegangan, atau bahkan bentuk lain dari ketidak-tahuan, yang dihasilkan oleh berita bohong/hoaks, yang pasti berkembang, terutama saat krusial yang pasti sangat menegangkan dan penuh emosional yang kurang terkontrol, walau sifatnya insidental, terutama pada masa kampanye dalam event pemilihan umum.

Oleh karena itu, maka mitigasi sosial / sosial politik di alam demokrasi yang dimaksudkan yaitu: rencana penanggulangan atau pengurangan resiko bencana, yang disebabkan oleh ulah manusia, adalah : “hasil dari tindakan langsung maupun tidak langsung manusia, seperti perang, konflik sosial, serangan teroris, dan kegagalan teknologi”.

Yay, IDEP. , Panduan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, buku panduan praktis untuk sebelum, saat dan setelah Bencana, IDEP., Bali, 2010 : 6

Pada dasarnya proses penanggulangan/pengurangan resiko bencana, dilaksanakan merlalui empat (4) aspek langkah tindakan yang bertahap, yaitu : pertama, tahap kesiap-siagaan bencana; kedua, tanggap darurat; ketiga, pemulihan setelah terjadi bencana; dan keempat, adalah tahap pengembangan yang berkelanjutan. Dalam hal ini yang akan dibahas, adalah langkah yang pertama, tahap kesiap-siagaan bencana, yaitu : “mencegah atau mengurangi bencana, mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat bencana dan memastikan semua orang siap siaga jika terjadi bencana”. (Yay, IDEP. , Ibid., : 6-7). Yang disebabkan oleh ulah manusia. Contoh ulah manusia yang dapat menyebabkan timbulnya bencana sosial, misalnya :

- Berkembangnya jurnalis yang membakar nafsu dan keyakinan, radikalisme, prasangka negatif, serta politik ekstrem lewat media sosial, seperti blog, portal palsu, dan media sosial yang anonim. J. Haryatnoko, SJ. Ditengah semakin canggihnya teknologi digital, begitu mudahnya orang memunculkan berita-berita bohong untuk menciptakan kebencian dengan memanipulasi fakta. Kebencian ditanamkan dengan mengubah kata-kata, foto, bahkan vidio. Situasi ini membawa sejumlah konsekuensi serius bagi

masyarakat. Konsekuensi pertama, adalah kemerosotan nilai kebenaran. Kedua, meningkatkan intoleransi. Suburnya peredaran berita bohong terjadiketika masyarakat hanya berelasi dengan kelompok-kelompok sealiran. (Kompas, 21 Desember 2018: 12 : 1-3).

- Jumlah URL yang digunakan untuk menyebarkan hoaks(sejak 18 Agustus 2019) sampai kemarin (3 September 2019/penulis) sudah lebih dari 500.000. Artinya, penyebaran hoaks masih tinggi. ... hoaks itu tak hanya berisi disinformasi, tetapi juga hasutan dan upaya adu domba.” (Kompas, 3 September 2019 , 11 : 3-5).
- Selama 50 tahun, api konflik Papua tak pernah padam dan hari ini sempat membara semakin besar. Dipicu oleh persekusi dan perlakuan rasisme di Jawa Timur menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia pada 15 dan 16 Agustus, reaksi massa di Papua dan Papua Barat muncul dan berujung pada aksi anarkistis yang berlangsung hingga akhir Agustus lalu. (Kompas, 6 September 2019 , 6 : 2-5).

Penanggulangan / Pengurangan Resiko Bencana, dapat membantu untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan dampak-dampak yang diakibatkan oleh adanya bencana. Ketika masyarakat menggunakan sumber daya sendiri untuk melakukan hal ini, kegiatan tersebut sudah masuk dalam kategori penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Pencegahan dan tindakan mitigasi bencana, dapat mengurangi atau menghilangkan ancaman, apalagi ancaman bencana sosial yang disebabkan oleh ulah/kegiatan politik manusia khususnya pada setiap tahapan pemilu, khususnya masa kampanye. Dalam hal tindakan pencegahan dan mitigasi bencana bidang sosial politik, antara lain:

1. “Untuk menangkal penyebaran hoaks. Masyarakat dan media harus bergerak bersama-sama memverifikasi dan mengklarifikasi segala informasi. Jika kultur ini dibangun bersama-sama, era pasca-kebenaran akan sirna dan tak perlu lagi ada peredaran berita palsu, ujaran kebencian dan gerakan radikalisme” Kompas, 21 Desember 2018: 15 : 3-4)

2. Penetapan dan pelaksanaan peraturan atau sanksi yang jelas dan tegas, untuk mendorong melaksanakan aturan bermasyarakat yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, hingga kehidupan masyarakat penuh dengan saling membantu dan menghormati.
3. Menyediakan informasi, penyuluhan atau pelatihan, dan kotak pengaduan, termasuk pendidikan deradikalisasi, yang baru dilaksanakan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan politik, bagi nara pidana teroris/radikal. Karena sejak semula “Agama boleh beda, tetapi katong(kami) tetap satu gandong” tutur Djafar Hernaulu, Imam Masjid dari Desa Laha ... dalam peresmian gedung Gereja Kristen Protestan Maluku di Desa Kariu, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Juli 2017. Saat itu Umat Islam dari Desa Hualoy Kabupaten Seram Barat, ikut hadir. Kompas, 21 Desember 2018: 15 : 1-3)
4. Mitigasi Bencana Dan Penanggulangan Mulai Dari Desa. Sebagian besar desa di Indonesia memiliki akar sejarah mitigasi bencana secara umum. “Saat ini, masyarakat desa mulai memikirkan cara mitigasi bencana lebih modern. Salah satunya dapat dilihat di Desa Pandanlandung, Kecanatab Wagir, Kabupaten Malang. Desa itu melakukan pemetaan desa, baik peta spasial maupun peta sosial, sebagai bagian dari sistem informasi desa (SID)”. Kompas, 21 Desember 2018: 20 : 1).

D. Penutup

Konsep mitigasi bencana sosial dalam demokrasi Pancasila di NKRI ke depan, dilaksanakan melalaui program pengembangan rencana kerja mitigasi sosial politik berkelanjutan atau rencana kerja mitigasi tindaklanjut, antara lain harus mempertimbangkan :

1. “Indonesia saat ini, terlampau besar dan beresiko untuk dipimpin secara avonturistik. Petualangan politik dalam kebijakan ekonomi, hanya akan menjerumuskan kita kembali ketidak pastian”. Djoko Suyanto, Opcit., : 115
2. “Persoalan keadilan, toleransi, dan keadaban publik tidak bisa dijawab hanya dengan demokrasi. Kita butuh Ideal-Ideal tambahan untuk

melengkapi. Untuk masalah keadilan, kita perlu pandangan dan kebijakan ekonomi yang sesuai”. Djoko Suyanto, *Ibid.*, : 121

3. “Kita semua diberi kebebasan dan otonomi. Ini escape from freedom. Kita semua mampu dan punya hak yang sama untuk berikhtiar dalam demokrasi”. Djoko Suyanto, *Ibid.*, : 135

Atas tiga pertimbangan utama sebagaimana dikemukakan oleh Jendral (purn) Djoko Suyanto, dalam bukunya yang berjudul “delapan pemikiran politik dalam DEMOKRASI KITA”, yang menunjukkan bahwa Kita semua diberi kebebasan dan Otonomi. Ini Escape From Freedom Kita, maka penulis mengusulkan satu paket konsep mitigasi bencana sosial / sosial politik berbasis Demokrasi Pancasila, dalam bentuk sebuah usulan :

Pertama, dirasa sangat perlu adanya minimal Partai Politik yang berlandaskan pada SPIRITUALITAS LINTAS AGAMA/ SPIRITUALITAS MULTI AGAMA,

Kedua, Negara tidak memperbolehkan adanya partai politik yang hanya berbasis agama tertentu, atau setidaknya visi misi dan kegiatannya partai, tidak hanya mendasarkan atau mengaktualisasikan atas dasar agama tertentu, tetapi berlandaskan pada konsep sila perta dari Pancasila.

Hal tersebut searah dengan penghayatan dan pengamalan ajaran, tujuan dan dasar negara kita Pancasila, yang mengaktualisasikan diri rakyat Indonesia yang berketuhanan yang maha esa, bukan beragama tertentu Yang Maha Esa.

Usulan ini mendukung anjuran pemikiran yang progresif menuju penguatan kembali eksistensi NKRI harga mati, antara lain : adanya penyampaian wacana gambaran Umum Menteri Agama (Menag.RI) Bpk. Lukman Hakim Saifudin yang menilai bahwa : “isu agama yang digunakan dalam dunia politik belakang ini, tiak sesuai dengan isi subtansinya. Indonesia ramai diguncang dengan isu agama sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta lalu hingga menjelang Pilpres 2019 ini”. <https://jatimnow.com/baca-9469-isu-agama-dibawa-pada-kampanye-politik-begini-kata-menag>, diakses 06/03/2019 jam 06.15. Selain hal tersebut juga searah dengan pendapat Mediyah Rahmad

Saputra, yang menyampaikan gagasan tentang konsep pluralitas agama dari pakar, yaitu bahwa :

Pluralisme adalah toleransi. Jadi pluralisme agama, adalah toleransi agama. Kebanyakan orang yang menafsirkan pluralitas demikian. Anggapan bahwa pluralisme agama toleransi agama, adalah anggapan subyektif yang jelas-jelas ditolak oleh para pakar penganjur pluralisme sendiri. Diana L Eck, direktur The Pluralism Project di Universiti Harvard, Amerika Serikat. Penekanan Pluralisme lebih pada kesamaan atau kesetaraan (equality) dalam segala hal, termasuk “beragama”. Setiap pemeluk agama harus memandang sama pada semua agama dan pemeluknya. Menurut saya, pluralitas agama tidak hanya kesamaan atau sekedar makna toleransi saja, tetapi konsep pluralitas adalah konsep dimana semua agama adalah sama, valid dan otentik atau biasa disebut relatif. Pluralisme agama, sebenarnya adalah, ajaran demokrasi dalam beragama, yang lebih menitik-beratkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Mediyah Rahmad Saputra dalam [http://www.akademia.edu/5135536/AGAMA POLITIK DAN PLURALISME](http://www.akademia.edu/5135536/AGAMA_POLITIK_DAN_PLURALISME), diakses 10/03/2019 jam.04.22.

“Pesan Almarhum BJ. Habibie, Kompas 9/3/1986 “Jangan terlalu banyak diskusi, jangan cengeng, tetapi terjunkan dir ke proses nilai tambah secara konsisten, pasti Indonesia akan terkemuka di Asia Tenggara dan di dunia” Ninok Leksono dalam Kompas, 12 September 2019, 1 : 1

DAFTAR PUSTAKA

- “Politik Hoaks”. dalam Kompas, 24 November 2018:7, kolm 4-7
- Hutan Adat Otsus Papua Belum Beri Manfaat dalam Kompas, 21 Desember 2018:13, kolm 1-3.
- Tajuk Rencana dalam Kompas, 14 Maret 2019:6, kolom 1
- Bangsa Dilamun Lupa dalam Kompas, 14 Maret 2019:7, kolm 1-4.
- Lingkungan Rusak, Manusia Terancam dalam Kompas, 28 Maret 2019 : 10, kolm 1-7.
- Kasus Munir, Ujian yang Belum Selesai dalam Kompas, 7 September 2019:3, kolm 1-3.
- Baleg DPR: Masukan Publik Tak Lagi Diperlukan dalam Kompas, 13 September 2019:3, kolm 3-7.
- Kohesi Sosial Terdampak dalam Kompas, 24 Nopember 2018: 5, kolm 3-7.
- Pemilu Makin mahal dan Gaduh dalam Kompas, 1 Agustus 2019 : 2, kolm 5-7.
- Presiden: Menyampaikan Pendapat Hak Konstitusional dalam Kompas, 1 Oktober 2019 : 1, kolm 3-7.
- Hantu Kebenaran Era Post-truth dalam Kompas, 21 Desember 2018:12, 1.
- Saatnya Menjawab Tantangan: Keadilan Dan Persatuan Menjadi Tantangan dalam Kompas, 22 Mei 2017, hal.1 kolom 2.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Persiapan_bencana, diakses senin, 25/03/2019 jam 13.09.
- Yayasan IDEP., Panduan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Yayasan IDEP., Bali, 2010: xi.
- Mencegah Pembusukan Demokrasi, dalam Kompas, Jumat, 14 Desember 2018, hal.2 Kolom 2-5.
- Politik Viral menuju 20 Oktober 2019 dalam Kompas, Jumat, 14 Desember 2018, hal.2 Kolom 2.
- Djoko Suyanto, Demokrasi Kita, 8 Pemikiran Politik, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014: 5,16,21,54.
- Agus Dwiyanto, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Gramedia Pustaka Jaya, Jakarta, 2011 : vii.
- <https://jatimnow.com/baca-9469-isu-agama-dibawa-pada-kampanye-politik-begini-kata-menag>, diakses 06/03/2019 jam 06.15.